

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN MINGGUAN

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

PERIODE : MINGGU 1

BULAN : OKTOBER 2018

NO.	KEGIATAN	HASIL	HAMBATAN	UPAYA PEMECAHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Rapat Internal bersama Pejabat Eselon III dan IV di Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah	<p>1. Rencana pelaksanaan KNI ICID di Semarang bulan Desember 2018.</p> <p>- Akan segera diadakan rapat oleh BBWS Pemali Juana untuk membahas hasil tersebut :</p> <p>Lokasi Pelaksanaan : UNISULA .</p> <p>2. Percepatan Pelaksanaan Paket-2 Pekerjaan APBD tahun 2018.</p> <p>- Untuk Paket-2 yang terlambat agar segera dibuat surat peringatan dan kalau perlu di skor cause meeting.</p>	-	-	-
2.	Wawancara dengan TVRI Jawa Tengah dengan Tema " Peran Serta Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Tengah"	<p>Telah terbentuk kelompok masyarakat Peduli Sungai yang untuk berperan dalam kegiatan-2 operasi dan pemeliharaan sungai,</p>	-	-	-
3.	Memimpin rapat Monitoring Penanganan Dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap Infrastruktur Sumber Daya Air di Jawa Tengah.	<p>Beberapa lokasi yang bermasalah masih ada yang belum ditindaklanjuti hal ini sangat berbahaya terkait dgn. Musim hujan yang segera datang (dasarian II, Oktober) dikhawatirkan akan berakibat banjir,</p>	-	-	-
4.	Memimpin Rapat Dikusi Laporan Akhir Paket Pekerjaan Zonasi Sungai Sengkarang Wilayah	<p>Dari hasil studi disimpulkan bahwa Sungai Sengkarang masih dalam zonasi A (tidak memungkinkan ditambang).</p>			

Sungai Pemali Comal Kab. Pekalongan				
-------------------------------------	--	--	--	--

NO.	KEGIATAN	HASIL	HAMBATAN	UPAYA PEMECAHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
5	<p>Mengikuti Rapat Koordinasi Nasional TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ryang Daerah) dengan Tema "Mewujudkan Indonesia yang Maju dan berdaya saing Berdasarkan Penataan Ruang yang Berkualitas dan Berkelanjutan" di Jakarta</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Status RTRW 34 Provinsi dan 476 Kab./Kota - Rapat dibuka olehBp. Menteri ATR Bp. Sofyan Jalil - Kita hidup di daerah yang banyak potensi bencana maka tata ruang harus menyesuaikan hal-2 tersebut. <p>Paparan 1.</p> <p>Kebijakan satu peta utk.meminimalisir konflik-2 kebijakan terutama di daerah perbatasan.</p> <p>Integrasi sudah sebagian besar selesai event next</p>			

Ir. LUKITO, Sp. 1

Pembina Tk. I

19610116 199010 1 001